

Konsorsium Jembatan Selat Sunda Segera Terbentuk

Awal 2014 peletakan batu pertama.

JAKARTA — Pemerintah akan membentuk konsorsium pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. "Pembentukan konsorsium tersebut bersama badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah setempat, dan mitra strategis," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sesuai rapat Pembangunan Jembatan Selat Sunda di Jakarta kemarin.

Namun pembentukan konsorsium menunggu terbitnya peraturan presiden mengenai dewan dan badan pelaksana kawasan strategis Jembatan Selat Sunda. Rencananya aturan yang masih berupa draf itu selesai dalam sepekan. Menurut Hatta, hingga kini biaya konstruksi jembatan sebesar US\$ 15 miliar atau sekitar Rp 135 triliun. Dana tersebut berasal dari pihak swasta.

Badan pelaksana itu, kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, yang kelak mengawasi konsorsium melakukan studi kelayakan. Selama ini kajian teknis pembangunan jembatan masih prastudi kelayakan. Studi kelayakan telah ber-

langsung bertahun-tahun, termasuk studi yang digelar konsorsium pemerintah Banten dan Lampung.

Namun berbagai studi itu belum cukup. Pemerintah perlu melakukan studi kelayakan secara penuh untuk mengetahui tingkat kelayakan, bentang panjang, pengembangan kawasan ekonomi sekitar jembatan, dan investasi. Setelah studi kelayakan selesai, barulah dibentuk badan usaha yang akan membangun jembatan sepanjang 27 kilometer itu.

Kementerian Pekerjaan Umum sudah mempertimbangkan pelbagai risiko dalam membangun jembatan, termasuk letak jembatan yang berada dalam peta rawan bencana. Kata Hermanto, hal tersebut akan dikaji saat studi kelayakan. "Tidak masalah. Buktinya, saat gempa besar di Kobe, Jepang, pada 1995, Jembatan Akashi-Kaikyo tak terpengaruh," katanya.

Jembatan Akashi-Kaikyo merupakan jembatan gantung di atas Selat Akashi, yang menghubungkan Maiko di Kota Kobe dan Kota Awaji di Pulau Awaji. Jembatan ini panjangnya 1.990 meter. Bulan ini pemerintah berencana mengundang pakar dari Jepang untuk berbagi peng-

alaman negara mereka saat membangun jembatan, yang mirip Jembatan Selat Sunda ini.

Selain dari Jepang, Kementerian ingin menggali informasi mengenai pembangunan Jembatan Messina di Italia, yang panjangnya melebihi Jembatan Akashi-Kaikyo. Messina memiliki rancangan yang meliputi jalan sepanjang 20,3 kilometer dan rel kereta 19,8 kilometer.

Jika studi kelayakan berjalan mulus, menurut Hermanto, awal 2014 pemerintah melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan. Dia menargetkan jembatan tersebut bisa rampung dalam waktu sepuluh tahun. "Pembangunan bisa lebih cepat lagi. Tapi semua tergantung pendanaan," tutur Hermanto.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menambahkan, pemerintah akan ikut membantu memperkuat pembangunan Jembatan Selat Sunda melalui keterlibatan PT Jasa Marga dan PT Wijaya Karya. Tahap berikutnya, kata Mustafa, konsorsium akan terbuka untuk BUMN lain. "Persiapan akan lebih banyak lagi. Masih ada posisi untuk BUMN," ujar dia.

● SUTJI DECHVA



RIM Menyerah

Penjual memperhatikan *smartphone* BlackBerry di ITC Fatmawati, Jakarta Selatan, kemarin. Research in Motion, vendor BlackBerry asal Kanada, akhirnya menegakkan mematuhi keinginan pemerintah menyediakan penyaringan konten pornografi di servernya.

Ekspor Furnitur Rotan Melempem

JAKARTA — Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahjono memperkirakan ekspor furnitur rotan masih terus melempem tahun ini. Selain karena perubahan tren furnitur dari rotan menjadi sintetis, hal itu didorong oleh minimnya bahan baku rotan bagi industri lokal.

Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat nilai total ekspor furnitur rotan tahun lalu sebesar US\$ 137,95 juta. Angka ini turun 17,8 persen, tapi sedikit membaik dibandingkan ekspor tahun sebelumnya yang anjlok 29,8 persen.

Ambar mengatakan penurunan kinerja ekspor rotan disebabkan oleh munculnya produk-produk rotan sintetis yang menggeser produk rotan

alam Indonesia. Namun penurunan ini tidak hanya dialami dalam negeri, tapi juga dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. "Pasar produk rotan di Filipina, Thailand, dan negara lain juga turun karena direbut produk sintetis," katanya kemarin.

Hal ini, menurut Ambar, merisaukan karena mayoritas atau 85 persen produk rotan yang beredar di pasar dunia mendapat pasokan bahan rotan mentah dari Indonesia. Namun ternyata industri rotan dalam negeri juga terjepit karena tidak ada jaminan ketersediaan bahan baku.

Meski begitu, Ambar menyatakan nilai ekspor rotan secara keseluruhan masih cukup baik. Tahun lalu nilai ekspor yang merupakan gabung-

an produk furnitur dan kerajinan mencapai US\$ 2,7 miliar, atau naik 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini melampaui target asosiasi 15 persen."

Kinerja itu, menurut dia, cukup menggembirakan karena menunjukkan tren positif selama delapan tahun terakhir. Kecuali pada 2009 ketika semua komoditas furnitur dan rotan mengalami pertumbuhan minus dan total ekspor keduanya turun 15,25 persen.

Asosiasi, kata Ambar, menargetkan pencapaian ekspor rotan tahun ini melampaui US\$ 3 miliar. "Asmindo memproyeksikan dalam lima tahun ke depan atau akhir 2015 ekspor produk furnitur dan kerajinan dapat mencapai angka US\$ 5 miliar." ● KARTIKA CANDRA

IKLAN

Pertamina Didesak Bayar Ganti Rugi

JAKARTA — PT Pandanwangi Sekartadji mendesak PT Pertamina segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi US\$ 64,8 juta sebagai pengganti tanah seluas 199 ribu meter persegi di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Desakan itu sesuai dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 4 Oktober 2007 dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Maret 2009.

"Berdasarkan putusan Mahkamah Agung 21 Desember 2010, tidak ada alasan bagi Pertamina tidak melaksanakan putusan BANI," kata Direktur Utama PT Pandanwangi Sekartadji, Edwin Sas Goenarto, kemarin.

Sengketa antara Pandanwangi dan Pertamina bermula dari proyek pembangunan depot pada 1996. Dalam proyek itu, Pandanwangi menggandeng Jakarta Depot Satelit. Namun, belum seperti pekerjaan rampung, Pertamina

meminta renegotiasi dengan Pandanwangi akibat krisis moneter saat itu, tahun 1998.

Sejak itu, Pertamina dan Pandanwangi bertemu dengan intensif, tapi kata sepakat tidak bisa tercapai. Akhirnya, pada 1998, Pertamina meminta proyek itu dihentikan karena melambungnya nilai investasi.

Pandanwangi lalu mengajukan gugatan ke BANI pada 2007 agar Pertamina membayar ganti rugi sebesar US\$ 20,1 juta. Permintaan itu dikabulkan oleh BANI. Namun, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pertamina tidak diwajibkan membayar kerugian US\$ 20,1 juta itu, melainkan diperintahkan membayar ganti rugi US\$ 12,8 juta.

Ganti rugi dibayar Pertamina dalam dua tahap. Pembayaran pertama, US\$ 6,4 juta, dilakukan Pertamina tanpa hambatan. Namun pembayaran kedua tertunda karena Edward Soeryadjaya dari PT

Siwani Makmur Tbk mengklaim tanah proyek itu adalah miliknya.

Pandanwangi tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah Nomor 31/Sumur Bandung karena, saat pindah kantor pada 2001, sertifikat itu hilang. Pandanwangi lalu mengajukan sertifikat pengganti Nomor 32/Sumur Bandung. "Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, gugatan Edward gugur karena hanya bisa menunjukkan kopi sertifikat, bukan aslinya," ujar Edwin.

Dihubungi terpisah, juru bicara Pertamina, Mochamad Harun, menyatakan perseroan akan membayar ganti rugi sebesar US\$ 6,4 juta kepada PT Pandanwangi Sekartadji setelah memperoleh surat tanah proyek depot bahan bakar minyak di Balaraja itu. "Kami menunggu mereka menyerahkan surat tanah," ujarnya ketika dihubungi kemarin. ● CORNILA DESYANA | SORTA TOBING

MEMO BISNIS

Bank BRI

Menangkan Gugatan Mulia

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan tuntutan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) dan Dana Pensiun BRI atas PT. Mulia Persada Pasific (PT. MPPC), dalam hal ini PT. MPPC, mendapat apresiasi dari Bank BRI.

"Putusan tersebut tertanggal 30 Desember 2010 dari PN Jakarta Pusat. Hal tersebut merupakan kabar baik yang kami terima akhir tahun. Kami sangat mengapresiasi kinerja penegak hukum, utamanya pihak kejaksaan," papar Muhammad Ali Sekretaris Perusahaan Bank BRI di Jakarta (7/1).

Sebagaimana diketahui PT. MPPC merupakan pihak pengelola Gedung Perkantoran Mulia. Dikatakan Ali, jaksa telah bekerja secara optimal menjadi pengacara negara, mengawal BRI dalam kasus ini.

Sebagaimana diketahui, PT. MPPC digugat oleh Bank BRI karena telah melakukan wanprestasi atas pembangunan Gedung BRI di kawasan Sentra BRI, Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat. Pada saat negosiasi mau-

pun penandatanganan perjanjian BOT tersebut PT MPCC diwakili oleh Sdr. Djoko S. Tjandra selaku Direktur Utama PT MPPC.

Sengketa berawal dari perjanjian pengelolaan Gedung BRI oleh pihak PT. MPPC dengan cara BOT (*build, operate, transfer*) pada tahun 1990. "Dalam perjanjian tersebut PT. MPPC akan mengerjakan pembangunan Gedung BRI III dan fasilitas lain hingga tahun 1998, hingga saat ini Gedung BRI III tidak dibangun dan akhirnya kami melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada April 2010" tambah Ali.

Atas gugatan tersebut, hakim mengabulkan tuntutan pihak BRI kepada PT. MPPC untuk menyerahkan gedung BRI II, gedung parkir, dan seluruh fasilitas yang ada beserta hak pengelolannya. Selain itu, PT. MPPC diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.347.801.350.125,- "Kerugian secara materi ditanggung oleh BRI, karena hak sewa tahunan atas penggunaan BRI II tidak dibayarkan yang seharusnya sudah diterima kami pada tahun 1998" papar Ali. ■